

INTEGRASI MUSLIM PATANI: Reidentitas Sosial atas Dominasi “Nasional” Thailand

P. RUDOLF YUNIARTO
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

Abstrac

Area of Patani in the past known as South Thailand port polities and have owned important role become link between Islam Arab nations, Europe and Chinese merchants. Patani society in the history was also known as multiethnic society by geographical position effect in frontier area predominated by Malaysia Melayu-Muslim nation and predominated by Siam Thai-Budha nation. Roles of history of Patani Monarchic in the past as Islam center growth in South-East Asia have pushed the faithfulness growing of society and binding strength enough culture feel among Patani Malay Nation. Considering the role of history growth of Islam in the big past, hence, Islam for Patani Malay Nation is represent inseparable identity. The strong Islam identity factor support independence movement in Patani with society ideology form nation *shared sense of peoplehood*, feeling togetherness from an nation. The mentioned push incidence allienate feeling as differing faction from Thai nation who was majority.

Kata kunci: integrasi nasional, identitas sosial, diskriminasi budaya, multikulturalisme.

Pendahuluan

Wilayah Patani pada awalnya mencakup suatu wilayah kesultanan yang cukup luas, Patani yang dimaksud merujuk pada sebuah *Negeri Patani Besar* (Patani Raya) meliputi wilayah-wilayah Narathiwat (Teluban), Yala (Jalor) dan sebagian Senggora (Songkhla, daerah-daerah Sebayor dan Tibor) bahkan Kelantan, Kuala Trengganu dan Pethalung (Petaling). Dengan cakupan wilayah yang cukup luas tersebut Patani pada awalnya memiliki sejarah perdagangan dan ideologi ke-Islaman cukup panjang yang dapat dimaknai sebagai suatu wilayah geografis maupun ideologis Melayu Muslim dengan karakter berbeda.

Wilayah Patani dahulunya adalah kerajaan *Semi-Independent* Melayu yang merupakan bagian kerajaan Siam dari Sukhothai dan Ayutthaya. Setelah Ayutthaya runtuh tahun 1767 Patani memperoleh kemerdekaan yang penuh, namun kemudian di bawah Raja Rama menjadi bagian dari Thailand lagi. Di tahun 1909, terjadi *anexsasi* oleh Kerajaan Siam sebagai bagian

dari suatu perjanjian pembagian wilayah dengan pihak Kerajaan Inggris. Wilayah kekuasaan seperti Yala dan Narathiwat pada mulanya bagian dari Patani, tetapi batal dipersatukan dan menjadi provinsi tersendiri. Semenjak periode tersebut kemunculan pemberontakan anti Siam mengawali kehadirannya, dan dalam beberapa kejadian perseteruan adakalanya mengakibatkan kekerasan¹.

Topik tulisan di bawah ini akan berusaha menguraikan bagaimana proses sejarah integrasi wilayah Patani ke dalam wilayah Thailand diawali oleh kisah kerajaan yang merdeka menjadi sebuah wilayah subordinat Thailand. Perspektif kesejarahan akan dilihat untuk mengenali akar persoalan yang terjadi. Selain itu akan dilihat bagaimana perkembangan Patani setelah memasuki fase integrasi dengan masyarakat Thailand. Gambaran tersebut diharapkan dapat menghantarkan sebuah deskripsi mengenai perubahan identitas Muslim di Thailand melalui dinamika masyarakat Patani saat menghadapi lingkungan masyarakat yang lebih besar “dominasi nasional” negara Thailand.

Sejarah Singkat Kerajaan Patani

Merunut dari jejak sejarahnya, Patani merupakan kesultanan yang cukup penting dalam pertumbuhan daerah perdagangan dan penyebaran Islam di alam Melayu. Patani menjadi begitu penting dalam sejarah Islamisasi dan pertumbuhan perdagangan karena merupakan satu-satunya kota pelabuhan dan pusat perdagangan Islam yang paling berpengaruh yang pernah muncul di perairan laut Cina selatan². Merujuk pada catatan pelawat-pelawat China, wilayah Patani telah dikenali sejak abad kedua Masehi, melalui hubungan dagang antara pedagang Cina dengan negeri-negeri di Asia Tenggara. Mereka mengenali sebuah negeri

¹ Seperti yang diungkap oleh W.A.R. Wood dalam pembukaan Kisah Sejarah Perjuangan Melayu Patani Universitas Kebangsaan Malaysia, orang-orang Melayu telah menjadi korban sebuah pemerintahan yang '*misgoverned*'. Yang pada akhirnya kemudian menimbulkan kekacauan dan seringkali terjadi kekerasan di wilayah selatan antara tahun 1910 hingga 1923.

² Auni bin Haji Abdullah. 2001. Islam dan Perdagangan dalam Sejarah Alam Melayu. Malaysia. Darulfikir SDN BHO. p. 298.

bernama "*Lang-ya-hsiu*" atau *Langkasuka*³ yang terletak di pantai timur semenanjung tanah Melayu antara Senggora (Songkhla) dan Kelantan dengan ibukota terletak di sekitar daerah Yarang. Dalam catatannya disebutkan bahwa wilayah ini merupakan daerah perdagangan dengan adanya pelabuhan bagi para pelaut. Angkatan laut Cina saat akan menyebrangi wilayah teluk Siam dalam perjalanannya ke Vietnam, ke Semenanjung Melayu, telah menemukan daratan ini.

Menurut ahli sejarah Thailand, A.Teeuw dan Wyatt mengemukakan bahwa kerajaan Patani telah berdiri sekitar pertengahan abad ke-14 dan ke-15⁴. Saat itu Patani mulai dikenal melalui perdagangan dan penyebaran Islam. Cerita rakyat *Hikayat Patani* menceritakan mengenai asal mula Kerajaan Patani yang diawali dari sebuah kerajaan Melayu berpusat di Kota Mahligai yang diperintah oleh Phya Tu Kerab Mahayana (Hindu). Dalam hikayat tersebut diceritakan letak kerajaan yang cukup jauh ke daerah pedalaman dan sukar untuk didatangi oleh para pedagang menyebabkan Phya Tu Antara, anak Phya Tu Kerab Mahayana kemudian memindahkan pusat kerajaannya ke sebuah perkampungan nelayan yang kemudiannya diberi nama "Patani", tempat ini dipercayai berpusat di Kampong Grisek wilayah Patani sekarang ini⁵.

Perkembangan Patani dimulai pada kurun waktu abad ke-14 dan 15 sejalan dengan pesatnya bidang perdagangan dan penyebaran agama Islam. Kedudukannya secara geografi cukup strategis dimana Patani berada di pertengahan jalur lalu lintas perdagangan antara negeri

³ Nama Langkasuka dalam beberapa catatan terdapat banyak versi, ada yang menyebutkan *Lang-Hsi-Chia*, *Lakawn Suka* bahkan muncul pula dalam dongeng para petani Kedah, *Alang-kah-suka*, cerita dongeng seorang Puteri Sadong, yang menguasai Peri-Peri dan kambing liar bukit batu gamping, yang menolak semua peminang. Penjelasan rasional diutarakan Paul Wheatly dalam Nik Anuar Nik Muhamad, *Sejarah Perjuangan Melayu Patani, 1785-1954* bahwa Langkasuka dahulunya adalah kerajaan yang menguasai jalan perdagangan wilayah timur-barat melalui Segenting Kra dan kekuasaannya meliputi kawasan Semenanjung hingga ke Teluk Benggala. Kerajaan Melayu Langkasuka dipercaya telah ada sebelum abad ketiga belas dan digantikan menjadi Kerajaan Melayu Patani.

⁴ Teeuw, A. dan Wyatt, D.K. 1970. *Hikayat Patani*. Bibliotheca Indonesia 5. The Hague: Martinus Nijhoff. P. 3.

⁵ Haji Salleh, Siti Hawa. 1992. *Hikayat Patani*. Malaysia. Dewan Bahasa dan Pustaka Kementrian Pendidikan. p. 9-10

Melayu dan negeri Asia Timur dan di antara perairan selat Malaka serta Laut Sulu dengan perairan laut Cina Selatan. Jalur tersebut merupakan jalur perdagangan yang sangat terkenal, merupakan jalur perkapalan antar bangsa yang menghubungkan tanah Arab dan India bahkan dengan benua Cina. Patani dipandang sebagai pusat komersial yang penting untuk melayani pedagang-pedagang Islam Arab, India, Eropa maupun Cina. Patani merupakan kerajaan dengan cakupan daerah cukup luas dan padat di semenanjung laut Cina Selatan⁶.

Wilayah Patani kemudian menjadi *entrepot* dalam perniagaan, diantaranya dengan menjual hasil bumi berupa rempah-rempah yang ditukar dengan tekstil dan tembikar dari Cina. Selain itu juga menjadi tumpuan bagi perdagangan saudagar Arab dan India yang banyak membawa bahan-bahan tekstil mereka. Hasil dari perdagangan ini kemudian oleh para pedagang Patani dijual kembali bersama dengan hasil bumi dari Patani sendiri seperti lada hitam, emas dan bahan-bahan makanan lainnya. Aksi perdagangan yang dilakukan oleh pedagang-pedagang Patani ini diyakini telah sampai ke daerah semenanjung tanah Melayu di selatan, Pulau Sumatra, Pulau Jawa hingga Sulawesi (Makassar)⁷.

Kemasyhuran Patani sebagai pusat perdagangan kemudian menarik para penjajah Kristian dan Eropa yang pada awal 15 dan 16 mulai melakukan ekspansi kolonialisasi mereka di wilayah Asia. Tercatat Portugis dan Belanda turut meramaikan jalur perdagangan di wilayah ini terutama untuk mendapatkan hasil bumi seperti rempah-rempah, lada hitam dan emas yang menjadi hasil utama dari Patani. Tercatat Portugis sudah tiba di Patani pada tahun 1517 untuk melakukan transaksi perdagangan, kemudian pada tahun 1602 pihak Belanda juga datang dan melakukan perniagaan bahkan mendirikan pangkalannya di pelabuhan Patani. Berikutnya kemudian armada Inggris juga menjalankan kegiatan perdagangan.

⁶ Ibid, Auni bin Haji Abdullah. 2001 p. 300

⁷ Wyatt, David, K. 1984. Thailand a Short History. Thailand, Silkworm Books

Selain dikenal dengan jalur perdagangan wilayah Patani juga memiliki kedudukan yang cukup penting dalam proses Islamisasi Melayu. Penyebaran agama Islam di Patani lebih banyak dilakukan oleh para pedagang yang berinteraksi langsung dengan masyarakat Patani. Dalam hal pengaruh, Islam Patani banyak di pengaruhi oleh perkembangan Islam di Cina karena telah memiliki hubungan perdagangan yang terjalin cukup lama. D' Eredia, seorang pelawat Portugis, menuliskan dalam tahun 1613 bahwa Islam telah berkembang di Patani lebih awal daripada Malaka. Pernyataan serupa dikatakan oleh Teeuw dan Wyatt yang berkeyakinan bahwa Islam telah berkembang di daerah Kuala Berang, Terengganu, sejak sekitar tahun 1386- 1387⁸. Jadi Islam Patani pertama kali perkenalkan oleh para pedagang Islam Cina yang kemudian dilanjutkan oleh para pedagang Arab dan India yang turut memperkenalkan Islam di Patani melalui jalur perdagangan.

Adanya kontak-kontak perdagangan dan penyebaran Islam ini mendorong Patani menjadi kerajaan makmur dan mencapai zaman puncak dalam perkembangan wilayah kerajaan. Posisi Patani muncul dan berkembang menjadi kekuatan politis dan ekonomi. Patani bisa melibatkan dan menggabungkan tetangga mereka Johor, Pahang dan Kelantan pada tahun 1530 dan 1540 menjadi satu kekuatan. Posisinya yang cukup penting baik dari segi politik dan geografis menempatkan kerajaan Patani menjadi daerah yang harus diperhtungkan. Zaman keemasan ini berlangsung ketika diperintah oleh empat orang Raja perempuan yaitu Raja Hijau (1584-1616), Raja Biru (1616-1624), Raja Ungu (1624-1635) dan Raja Kuning (1635-1651). Patani pada zaman Ratu-ratu sangat makmur dan kaya. Patani muncul sebagai pusat perdagangan penting dan menjadi pintu masuk bagi para pedagang yang hendak pergi ke Cina dimana saat itu Patani memiliki hubungan perdagangan dengan semua negeri di Asia Tenggara. Selain besar dalam kekuatan ekonomi Patani juga ditunjang oleh kestabilan politik dalam negeri yang membuat Patani dihormati oleh negari-negeri seberang mereka seperti kerajaan di

⁸ Ibid Teeuw, A. dan Wyatt, D.K. 1970. p. 4, lihat juga Surin Pitsuwan, Islam di Thailand,

semenanjung Melayu Pahang dan Johor Baru, termasuk kerajaan Ayudhya. Perdagangan Patani terus meluas hingga mencapai daerah-daerah nusantara; Palembang, Aceh, Batam, Batavia (Jakarta), Makasar hingga Ternate⁹.

Sebagai sebuah kerajaan, kekuasaan Patani terkenal dengan sebutan *Negeri Patani Besar*. Kecuali Johor, tidak ada negeri lain di belahan timur Semenanjung Melayu yang memiliki kemakmuran dan kekuatan sehebat Patani kala itu. Sumber kekuatan yang cukup besar ini ditunjang oleh ikatan tali perkawinan yang dilakukan oleh Raja Ungu dengan Sultan Pahang yang menguasai wilayah kerajaan Pahang. Hal ini semakin mengukuhkan kekuatan Patani. Pada masa ini wilayah Patani tumbuh menjadi sebuah kekuatan politik dan daerah komersial.

Kedudukan Patani di Semenanjung Siam yang strategis dari segi geografi, telah menyebabkan kota itu menjadi harapan pedagang-pedagang asing baik dari barat atau timur untuk singgah, beristirahat ataupun berdagang. Dalam masa yang singkat saja Patani muncul sebagai sebuah kerajaan yang penting, maju dari segi ekonomi serta stabil dari segi politik dan pemerintahan. Selain itu dasar perhubungan antar bangsanya yang baik telah menyelamatkan Patani dari kejatuhan kepada pihak penjajah-penjajah seperti kerajaan Siam, Inggris dan Prancis.

Kemunduran Patani dan Awal Integrasi Wilayah

Pada zaman akhir pemerintahan Raja Kuning (1635-88), Patani mulai menuju tanda-tanda zaman kemerosotan. Keadaan ini disebabkan karena Raja Kuning meninggalkan kerajaan tanpa seorang pengganti yang berwibawa. Dalam *Hikayat Patani* disebutkan setelah kematian raja terjadi pemberontakan diantara pembesar-pembesar negeri yang bergelar Datuk yang berebut kuasa untuk menjadi Bendahara (Perdana Menteri) dan menjadikan Raja Patani

LP3ES, Jakarta, 1989 p. 7.

⁹ Ibid, Wyatt, David, K. 1984 p. 23

sebagai boneka saja¹⁰. Pada awal abad ke-17 pemerintahan dari dinasti Kelantan mulai menguasai kerajaan Patani.

Perselisihan kekuasaan kemudian mewarnai dinamika kerajaan Patani. Perselisihan menimbulkan perang saudara yang berakibat negeri Patani mengalami kekacauan pemerintahan serta keresahan di kalangan penduduk. Perang saudara yang terjadi menyebabkan situasi perdagangan goyah terutama bagi para saudagar asing yang berangsur-angsur memindahkan pola peniagaan mereka ke negeri lain yang jauh lebih aman seperti Malaka dan Singapura. Kenyataan ini akhirnya berdampak pada ekonomi Patani yang mengalami kemerosotan¹¹.

Dalam masa Patani sedang menghadapi kekacauan politik, pihak kerajaan Siam (Ayudhya) sedang berperang dengan Burma dalam usaha mempertahankan wilayah kekuasaan mereka. Peperangan Burma-Siam secara tidak langsung melibatkan negeri-negeri Melayu utara, termasuk Patani yang menjadi daerah "rebutan" di antara kedua kuasa kerajaan tersebut. Upaya penguasaan wilayah ini ditengarai memiliki beberapa motif; *Pertama*, sebagai "prestis politik" dimana semakin luas cakupan wilayah kerajaan semakin besar pengaruh dan penghargaan dari bangsa lain, *kedua*, motif sosio ekonomi yang berhubungan dengan kepentingan mendapatkan tenaga kerja manusia murah sambil memperolehi sumber-sumber pendapatan yang dapat dimiliki dari pelabuhan Patani yang cukup ramai saat itu. *Ketiga*, motif strategi ekonomi untuk menguasai wilayah strategis Segenting Kra yang menghubungkan Teluk Benggala dengan Teluk Siam. Peristiwa peperangan antara Burma-Siam mau tidak mau melibatkan wilayah serta gangguan terhadap kedaulatan Patani.

Siam pada akhirnya dapat menguasai wilayah Patani, dengan peperangan besar tentunya. Pada tahun 1776 Phya Taksin Raja Thonburi berhasil mengambil alih kerajaan Patani melalui jalan

¹⁰ Ibid, Haji Salleh, Siti Hawa. 1992 p. xviii

¹¹ Ibid, Teeuw & Wyatt 1970, 72

peperangan. Walaupun kerajaan Melayu Patani berusaha untuk mempertahankan diri tetapi Siam berhasil menguasai Patani pada tahun 1778. Akibat kekalahan itu, sebanyak 4.000 orang Melayu Patani menjadi tawanan dan dibawa ke Bangkok sebagai hamba tebusan. Setelah kejatuhan Patani itu, Siam melantik Raja baru yang sesuai dengan selera mereka. Genre gerakan anti-Siam mulai tumbuh dan berkembang pada masa ini. Berbagai pemberontakan muncul justru dari pemimpin yang ditunjuk oleh kuasa kerajaan Siam. Salah satunya adalah pemberontakan Tengku Lamidin Raja Patani yang berusaha untuk memberontak dengan bantuan Raja Annam yang beragama Islam, Okphaya Cho So, dan menyerang kedudukan tentara Siam. Dibantu oleh Sheikh Abdul Kamal, seorang ulama berasal dari Mekah, tetapi akhirnya gagal.

Munculnya berbagai pemberontakan di wilayah selatan, memaksa pemerintah kerajaan Siam menyelesaikan sengketa yang terjadi di wilayah selatan. Kebijakan anti pemberontakan yang dikeluarkan oleh Raja Chulalongkorn adalah dengan memecah Kerajaan Melayu Patani menjadi 7 wilayah atau *hua muang* yang ditujukan sebagai siasat melemahkan kekuatan orang Melayu Patani. Di tiap-tiap wilayah yang terbagi, kemudian dilantik seorang raja atau *chao muang* di bawah pengawasan kerajaan Siam di Songkhla. Dengan perubahan ini, maka kesatuan wilayah Kerajaan Melayu Patani menjadi terpecah. Tujuh buah negeri tersebut dan raja-raja pemerintahnya adalah seperti berikut: (1). Patani Tuan Sulung, (2). Teluban Nik Dir, (3). Nongchik Tuan Nik, (4). Jalor Tuan Yalor, (5). Jambu Nai Pai, (6). Rangae Nik Dah, (7). Reman Tuan Mansur.

Dengan memecahkan kerajaan Melayu Patani, kerajaan Siam berusaha melemahkan orang Melayu Patani agar tidak bangkit menentang pihak kerajaan. Peraturan keras yang dikeluarkan kepada raja-raja negeri Melayu yang membangkang adalah hukuman mati ataupun penjara yang akan diberlakukan - termasuk bagi keluarga mereka, apabila mereka kemudian memberontak. Sebagai bentuk pengukuhan penguasaannya atas negeri-negeri

Melayu, pihak kerajaan mensiasati melantik raja-raja yang berketurunan Siam, sebagai wakil kerajaan pusat untuk mengawasi negeri wilayah selatan. Selain itu, kerajaan Siam juga memindahkan orang-orang Siam utara ke negeri-negeri tersebut dengan tujuan mengimbangi penduduk yang berketurunan Melayu.

Tidak puas menguasai wilayah Patani, pada tahun 1821, Siam kemudian menyerang pula Kedah dan memaksa Sultan Abdullah – raja Patani, melarikan diri ke Pulau Pinang. Tujuan dari penyerangan ini adalah untuk mengurangi kekuasaan dan pengaruh Melayu di wilayah Patani. Kenyataan ini mengakibatkan kekosongan jabatan raja di Patani. Pada masa tahun 1817 hingga tahun 1842, Patani telah diperintah oleh sekurang-kurangnya dua orang Raja Melayu. Orang yang pertama memegang jawatan itu ialah Tuan Sulong, anak Raja Bendahara Kelantan, Long Jenal. Tuan Sulong yang bergelar Haji memegang jabatan hingga tahun 1832. Tuan Sulong kemudian disingkirkan karena terlibat dalam kebangkitan anti-Siam dalam tahun 1831. Gerakan anti-Siam mendorong pihak kerajaan melakukan upaya-upaya penyingkiran raja dan tokoh Patani yang bertujuan tetap membuat kerajaan Patani dalam suasana kacau yang pada akhirnya melemahkan kekuatan-kekuatan sentrifugal anti-Siam agar tidak dapat bergerak leluasa.

Situasi Patani semakin terpojok dan dipinggirkan dengan diadakannya perjanjian antara pihak kerajaan Inggris dengan Kerajaan Siam dalam hal pembagian wilayah. Situasi politik regional akibat adanya kolonisasi Eropa di wilayah Asia mendorong Siam kemudian mendekonstruksi wilayah kekuasaan mereka untuk membendung arus imperialis yang ingin menguasai wilayah semenanjung. Pihak Inggris yang telah menguasai semenanjung bagian selatan tertarik dengan empat daerah taklukan penting di sebelah selatan Patani; Kedah, Kelantan, Trengganu dan

Perlis. Daerah-daerah tersebut dianggap penting karena berpretensi ekonomi sebagai daerah baru yang akan dijadikan pelabuhan penting dan menjadi pangkalan perang Inggris di Asia¹².

Konsolidasi Inggris terhadap empat wilayah tersebut berdasarkan pertimbangan beragamnya kepentingan negara-negara Eropa di Asia. Saat itu orang-orang Jerman sedang mendesak Bangkok agar memberikan konsesi kepada mereka di pulau Langkawi lepas pantai Andaman untuk dijadikan tempat pengisian bahan bakar bagi kapal-kapal mereka, sementara itu Rusia juga sedang bersaing dengan Perancis untuk memperoleh konsesi juga pembuatan sebuah terusan lintasan Segenting Kra. Inggris berusaha agar mendapatkan wilayah pantai timur Cina selatan dengan mengesampingkan wilayah Patani yang sedang berada dalam situasi sengketa dengan kerajaan Siam.

Pilihan ini ternyata lebih menguntungkan daripada bermusuhan dengan Siam apabila turut memasukan Patani sebagai daerah kekuasaan mereka. Terlebih lagi gejolak di Patani dapat memperkeruh hubungan Inggris-Siam bila Inggris turut campur dalam urusan dalam negeri Patani. Sikap hati-hati ini dan sikap diplomatis Inggris membuahkan hasil dengan ditandatanganinya suatu perjanjian antar Inggris-Siam yang memutuskan hasil menyerahkan wilayah Kedah, Kelantan, Trengganu dan Perlis kepada kekuasaan Inggris. Sebagai imbalannya Inggris kemudian mengakui kedaulatan Siam terhadap provinsi Patani dan mengembalikan semua persoalan yang menyangkut hak ekstra teritorial wlayah dan kenegaraan kepada pengadilan Siam. Perjanjian ini dikenal dengan perjanjian Inggris Siam 1902¹³.

PERIODESASI INTEGRASI MELAYU PATANI

Periodesasi	Konteks	Sejarah	Pelaku
1785	Patani diserang oleh kerajaan	• Selepas Phya Taksin berjaya	Phraya Chakri memerintah adiknya, Putera Surasi, dengan dibantu oleh Phraya Senaphutan, Gabenor

¹² Yuniarto, P. Rudolf. 2004. *Integrasi Melayu Patani: Sejarah Perubahan Geopolitik Dan Demografi*. PSDR-LIPI.

¹³ Ibid, Yuniarto, P. Rudolf. 2004.

	Chakri	mengalahkan Burma di Ayuthia dalam tahun 1776, Siam kemudian mengalihkan perhatiannya ke daerah negeri-negeri di selatan semenanjung yaitu Ligor, Songkhla dan Pattalung Kerajaan Melayu Patani berhasil dikuasai oleh kerajaan Chakri (Siam) pada tahun 1786.	Pattalung, Palatcana dan Songkhla supaya menyerang Patani pada tahun 1785. Raja Patani berusaha bertahan namun gagal menahan serangan Siam.
1808	Kerajaan Melayu Patani dipecah menjadi 7 wilayah	Pemberontakan dari tokoh-tokoh Melayu Patani dapat dipatahkan oleh Siam dengan mendapat bantuan kerajaan pusat di Bangkok, kemudian Kerajaan Melayu Patani dipecahkan kepada 7 buah negeri atau <i>Hua Muang</i> untuk melemahkan orang Melayu Patani. 7 buah wilayah yang dipisah: 1. Patani Tuan Sulung 2. Teluban Nik Dir 3. Nongchik Tuan Nik 4. Jalor Tuan Yalor 5. Jambu Nai Pai 6. Rangae Nik Dah 7. Reman Tuan Mansur	- Sultan Muhammad kalah dalam pertempuran dengan pihak Siam. Akibat kekalahan itu, sebanyak 4,000 orang Melayu Patani telah dijadikan tawanan dan dibawa ke Bangkok sebagai tawanan. - Tengku Lamidin telah bersatu dengan Raja Annam yang beragama Islam, Okphaya Cho So, dan memberontak serta menyerang kedudukan tentera Siam di Tiba, Chanak, Songkhla dan Saiburi. Dalam kebangkitan itu, Tengku Lamidin telah dibantu oleh Sheikh Abdul Kamal, seorang ulama berasal dari Mekah, tetapi gagal - Pada tahun 1808 Datuk Pengkalan juga bangkit menentang Siam. Walau bagaimanapun, semua pemberontakan yang dilakukan tokoh-tokoh Patani dapat dipatahkan oleh Siam
1838	Kebangkitan anti-Siam	Kejadian dipicu oleh keadaan yang tidak mendukung kesejahteraan rakyat Patani. Usaha ini dilakukan untuk mengembalikan kekuasaan raja dan kedaulatan Patani yang diambil alih oleh Siam.	Kekecewaan tokoh-tokoh Patani terhadap Raja Rama III yang melakukan pelantikan Gubernur kepala tujuh wilayah Patani agar menyokong pemerintahan Siam agar menjadi kokoh
1896	Perubahan kebijakan pemerintahan daerah dalam upaya mendapatkan dukungan material dengan meminta upeti lebih yang diberlakukan oleh Raja Chulalongkorn	Rancangan pembagian wilayah berdasarkan sistem Thesaphiban. Di bawah peraturan ini, kerajaan negeri Melayu tidak lagi mempunyai kuasa otonomi dan dengan itu juga Raja-Raja Melayu akan kehilangan kedaulatan mereka. Sistem Thesaphiban, pembagian wilayah yang disusun dalam satu unit yang dikenali sebagai daerah-daerah. Tiap-tiap daerah ini dipimpin oleh suatu dewan perwakilan (Khaluang Thesaphiban) yang bertanggungjawab kepada Menteri Dalam Negeri. Di bawah sistem ini juga, semua kaki tangan kerajaan dari peringkat atas sehingga ke paling bawah dibayar dengan gaji kerajaan.	Raja Chulalongkorn memberlakukan sistem Thesaphiban sebagai akibat pengolakan yang terjadi di Asia Tenggara tahun 1890 dimana mulai berkuasanya penjajah Inggris dan Perancis yang mengancam wilayah integritas Siam
1901	kerajaan Melayu Patani melakukan upaya pemberontakan terhadap Siam	Raja dan para petinggi kerajaan Patani menolak kehadiran pegawai kerajaan Siam dan pegawai-pegawainya karena diangap ikut campur tangan terlalu dalam mengenai urusan pembagian wilayah di negeri-negeri. Patani Diberlakukannya peraturan pembagian wilayah nomor 120 yang bertujuan memperkokoh penguasaan kerajaan Siam atas wilayah Patani yang berbuntut penangkapan raja-raja Melayu termasuk diantaranya Tengku Abdul Kadir tahun 1902	Tengku Abdul Kadir merancang untuk memberontak pada akhir bulan Oktober, 1901 selepas perbekalan senjata dan peluru tiba dari Singapura, upaya pemberontakan ini didukung oleh negeri Islam lain
1902	Perjanjian Anglo - Siam	Terjadinya pemisahan wilayah Melayu Patani menjadi provinsi melalui perjanjian antara pemerintah Inggris dan pemerintah kerajaan Siam	Dilakukan antara utusan kerajaan Inggris untuk wilayah Asia Frank Swettenham dengan Raja Siam Chulalongkorn, dimana wilayah Kedah, Trengganu, Kelantan dan Perlis masuk menjadi wilayah Kerajaan Inggris sedangkan Patani menjadi bagian wilayah kerajaan Siam.

Sumber: P. Rudolf. Y (2004). *Elaborasi studi*.

Integrasi Nasional dan Penolakan Muslim Patani

Akibat dari penanda tanganan perjanjian Inggris-Siam 1902 wilayah Patani dianggap bukan sebuah kerajaan melayu lagi, tetapi merupakan sebuah wilayah hasil penaklukan bangsa Thai.

Sebagai kelompok minoritas dengan identitas Islam, Muslim Patani dihadapkan pada keharusan mengikuti pola integrasi nasional agar menjadi satu wilayah kesatuan yang utuh dengan wilayah Thailand lainnya. Usaha-usaha integrasi nasional dilakukan pemerintah kerajaan melalui asimilasi bangsa Melayu Islam ke dalam sistem pendidikan bangsa Thai. Diantaranya dengan mengharuskan penduduk untuk menyekolahkan pemuda-pemuda Patani ke sekolah-sekolah Thai dengan menggunakan bahasa Thai sebagai bahasa pengantar¹⁴.

Saat diperintah oleh PM Phibun Songgram (1938-1944) upaya integrasi wilayah nasional kerajaan di implementasikan melalui sistem politik ultra-nasionalis. Inkorporasi politik ini dilakukan melalui kebijakan konsolidasi wilayah bangsa Melayu untuk kepentingan integrasi. Salah satu kebijakan yang dilakukan adalah konsolidasi administrasi yang dirancang untuk mengintegrasikan wilayah-wilayah Bangsa Melayu ke dalam sistem politik nasional Kerajaan Siam yang dipusatkan di Bangkok. Namun karena masyarakat Muslim tidak memiliki pengalaman dalam masalah ini, maka kebijakan ini dilakukan di bawah pimpinan pejabat-pejabat pemerintah pusat yang beragama Buddha. Sejalan dengan kebijakan ini, pemerintah juga melakukan kebijakan integrasi ekonomi yang bertujuan mengelola provinsi-provinsi ini agar mampu membiayai pemerintahannya sendiri dan tidak menjadi beban kerajaan.

Disamping menerapkan kebijakan pemerintahan sentralistik, pihak kerajaan Siam menerapkan identitas nasional dengan semboyan trinitas (*lak thai*) yang hanya mengakui satu kebangsaan bangsa Thai, satu agama Buddha, dan tunduk para kekuasaan Raja¹⁵. Dari dimensi sosial budaya, identitas semacam ini dapat dilihat sebagai bentuk pemaksaan ideologi yang dapat mencerabut masyarakat Muslim Patani dari tradisi dan identitasnya. Karena diluar tiga unsur tersebut kemudian tidak dianggap signifikan dalam urusan campur tangan kekuasaan maupun dalam penentuan kebijakan negara. Oleh karena itu menjadi mudah dipahami jika

¹⁴ Problema minoritas Muslim di Asia Tenggara Kasus Moro, Pattani, dan Rohingya, Seri Penelitian PPW-LIPI No. 06/2000. P.. 45

berbagai kebijakan Kerajaan Siam yang bertujuan untuk mengintegrasikan wilayah Thailand dalam penerapannya kemudian mendapat tantangan keras dari masyarakat. Berbagai kebijakan asimilasi kebudayaan kemudian mendorong tumbuhnya perlawanan bangsa Melayu Pattani karena khawatir identitas budayanya akan tercerabut.

Gerakan perlawanan bangsa Melayu Pattani pertama kali muncul sebagai sebuah gerakan damai yang memperjuangkan otonomi bagi Patani. Misalnya gerakan Haji Sulong melalui Dewan Keagamaan Islam yang mengajukan petisi kepada Pemerintah Kerajaan dengan tuntutan otonomi; Patani hendaknya dipimpin oleh putra daerah pilihan rakyat, 80% aparat Patani hendaknya muslim, bahasa Melayu dan Thai hendaknya sama-sama digunakan sebagai bahasa pengantar di pondok/madrasah, hukum Islam diterapkan bagi kaum Muslim, kemudian pendapatan daerah dimanfaatkan untuk masyarakat Patani, dan hendaknya dibentuk suatu lembaga Muslim¹⁶.

Perjuangan tersebut tidak bertahan lama karena Haji Sulong kemudian ditangkap. Setelah kematian tersebut muncul generasi penerusnya pada tahun 1959 yaitu Tengku Abdul Jalil yang mendirikan front perlawanan bawah tanah, yaitu Barisan Nasional Pembebasan Patani (BNPP). Gerakan ini tidak hanya menuntut otonomi seperti sebelumnya tetapi bergeser pada tuntutan kemerdekaan dan mendirikan negara Islam. Seiring dengan jatuhnya harga timah dan karet yang menjadi andalan perekonomian masyarakat daerah saat itu, masyarakat Patani mulai menyadari bahwa pemerintah selama ini hanya mengeksploitasi potensi ekonomi tanpa memberikan kontribusi kepada mereka secara lebih adil. Bersamaan dengan itu, generasi muda Patani yang terdidik mengambil inisiatif perlawanan dengan mendirikan Barisan Revolusi Nasional (BRN) yang bertujuan mendirikan Republik Islam Patani. Sementara golongan sekuler mendirikan front perlawanan yang berbeda karena perbedaan ideologi yaitu

¹⁵ Ibid, p. 73

¹⁶ Ibid, p. 174-175

Pattani Union Liberation front (PULO) sebagai pemerintahan bawah tanah. Walaupun berbeda secara ideologi kedua front perlawanan ini memiliki kesamaan dalam melihat posisi Pemerintah Thailand sebagai *internal colonisation* yang tidak mungkin diajak berkompromi. Selain itu mereka tidak berorientasi pada kejayaan masa lalu seperti golongan aristokrasi tradisional yang menuntut perjuangan kemerdekaan sepenuhnya.

Gerakan perlawanan yang muncul dipahami sebagai salah satu upaya mempertahankan identitas nilai keagamaan dan etnisitas mereka dengan menuntut dihentikannya sikap diskriminatif kerajaan Thai. Upaya kongkrit yang dilakukan dengan berusaha mendorong anak negeri menjadi lebih maju. Identitas lama yang masih dibayang-bayangi kejayaan Patani sebagai sebuah kerajaan besar mulai menunjukkan perubahan dengan diajukannya hak-hak otonomi mereka dalam masyarakat berbangsa yang lebih besar. Penyebabnya karena Patani dianggap sebagai golongan minoritas dan daerah taklukan kerajaan Siam, untuk itu masyarakat Patani tetap berupaya mempertahankan hak-hak otonomi dan identitas sosial mereka sebagai masyarakat dengan nilai-nilai ke-Islaman yang dianut oleh sebagian besar masyarakat.

Sementara dari pihak kerajaan, Pemerintah Siam berusaha memberikan konsesi-konsesi secara nyata kepada gerakan Separatis Melayu- karena upaya pemberontakan separatis tidak kunjung mereda. Antara lain membuat kebijakan mengembangkan toleransi dalam pluralisme beragama, perbaikan pendidikan, dan pemberian paket pembangunan sosial ekonomi di provinsi-provinsi selatan, disertai kebijakan rekrutmen terhadap kaum Muslim di sektor administrasi. Namun demikian Pemerintah Thailand tidak memiliki kecenderungan membuka ruang otonomi sebagai solusi bagi separatisme berdasarkan etnik ini tetapi menggunakan konsesi-konsesi tersebut sebagai instrumen untuk menjaga agar situasi tetap stabil. Berbagai kebijakan pembangunan ini ditanggapi secara berbeda oleh kelompok-kelompok dalam masyarakat sipil. Kelompok perlawanan radikal mencurigai kebijakan ini sebagai usaha

penetrasi terhadap budaya, ekonomi, dan masyarakat Patani. Kelompok ini tetap menggunakan kekuatan gerilya sampai akhir tahun 1997. Kaum aktivis Patani dari berbagai spektrum malah sepakat bergabung dalam satu payung organisasi bawah tanah yaitu MPR-MP (*Council of The Moeslem People of Pattani*)¹⁷.

Sebaliknya, kelompok moderat Patani yang justru melihat bahwa program-program pembangunan pemerintah sebagai hal yang patut dihargai. Perbedaan pendapat di kalangan masyarakat sipil ini mengakibatkan dukungan terhadap ide untuk mendirikan Darul Islam atau otonomi penuh tidak terlalu kuat. Pada sisi lain di lingkungan elit separatis sendiri, mereka belum mampu memperlihatkan kohesifitas antara kelompok dari berbagai ideologi yang berbeda yaitu Muslim, fundamentalis Islam, dan aristokrasi baik dalam tujuan maupun koordinasi perjuangan.

Reidentifikasi Sosial atas Dominasi “Nasional” Thailand

Pada hari Rabu (28 April 2004) beberapa kelompok orang muda melancarkan serangan- yang tampaknya terkoordinasi, terhadap pos-pos keamanan di Provinsi Yala, Pattani, dan Songkhla. Kelompok-kelompok tersebut kemudian terlibat dalam bentrokan dengan pasukan keamanan. Pasukan keamanan menewaskan 108 orang dari kelompok separatis, sementara pada pasukan keamanan, lima orang tewas, yakni tiga personel polisi dan dua serdadu militer (Kompas, 1 Mei 2004). Menyimak berita *kekerasan yang terjadi di Patani bila dimaknai merupakan salah satu bentuk identitas sosial masyarakat Patani yang direpresentasikan melalui gerakan separatisme bersenjata*. Mereka yang ambil bagian dalam serangan tersebut adalah sekelompok anak muda yang ingin mendirikan negara Islam mencakup wilayah Provinsi Yala, Pattani, dan Narathiwat. Ide separatisme ini muncul sebagai sebagai ungkapan

¹⁷ Peter Searle, *Ethno-religious Conflict: Rise or Decline? Recent Development in Southeast Asia*, Contemporary Southeast Asia Singapore April 2002.

ketidakberesan pemerintah Thailand dalam mengakomodasi persoalan-persoalan yang muncul di wilayah provinsi selatan yang sebagian besar adalah Melayu Muslim.

Kenyataan ini menunjukkan bahwa perlawanan yang masih berlangsung hingga sekarang dan belum menunjukkan kapan akan terjadi perdamaian pihak yang bertikai. Apabila menyimak permasalahan yang terjadi di Patani, persoalan di bagian provinsi paling selatan Thailand tersebut memang sangatlah kompleks. Satu hal yang menjadi pemicu keresahan masyarakat adalah rasa ketidakadilan yang memisahkan kelompok minoritas Melayu Muslim dari kelompok mayoritas dominan Thai. Hal ini merupakan sebuah hasil warisan sejarah hasil penaklukan (*conquest*) yang dilakukan oleh kerajaan Siam terhadap kerajaan Patani, pembangunan negara bangsa (*state building*) Thailand, migrasi penduduk utara ke selatan dan ketidakmerataan pembangunan ekonomi (*economic development*). Konflik yang terjadi antar etnik mayoritas Thailand dan minoritas Patani dimulai dengan kebijakan politik integrasi dari negara yang dipusatkan pada integrasi administrasi politik, integrasi kebudayaan, dan integrasi kegiatan perekonomian. Ditambah lagi dengan kekacauan sosial yang terjadi di daerah perbatasan Thailand dan Malaysia seperti *gangster*, politisi busuk, pasukan keamanan yang korup, tidak adanya hukum, menjadi hal-hal yang memperumit persoalan di Patani¹⁸. Tindakan sekelompok anak muda yang oleh pihak keamanan dipercaya sebagai anggota gerakan separatis Barisan Revolusi Nasional adalah contoh akumulasi dari segala kekecewaan atas persoalan yang terjadi.

Merujuk pada konsep identitas yang diungkapkan oleh Fisher (2001)¹⁹ yang mengasumsikan bahwa kemunculan konflik disebabkan oleh karena adanya identitas yang terancam, berakar pada hilangnya sesuatu atau penderitaan di masa lalu yang tidak dapat diselesaikan. Kenyataan yang terjadi pada gerakan separatisme Muslim Patani adalah wujud sikap

¹⁸ Interview: Perrayot Rahimullah (Universitas Songkhla), 2004

¹⁹ Fisher dkk, Mengelola Konflik, British Council, Jakarta, 2001 p. 8-9

diskriminatif negara terhadap masyarakat Melayu yang cukup merugikan kepentingan warga Patani. “kita” dan “bukan kita” seperti yang dituliskan Edward Bruner semakin memperkokoh identitas bahwa penduduk Patani berbeda dengan bangsa Thai sepenuhnya. Disini masyarakat Patani berusaha menjaga identitas aslinya karena adanya agama dan mekanisme internal kelompok yaitu adanya perasaan bersama atas nenek moyang yang keturunan bangsa Melayu. Karena merasa menjadi bagian dari bangsa Melayu kemudian mereka menolak ide pembauran politik dan akulturasi budaya orang-orang Thai.

Orang Thailand Islam yang berbahasa Melayu mengidentikkan dirinya dengan orang Islam Malaysia. Mereka terkonsentrasi di suatu daerah dan menjaga jarak sosial serta mengisolasi diri dari pemeluk Budha bahkan dengan pemeluk Islam yang berbahasa Thai di Bangkok. Pola isolasi diri ini lantas menjadikan mereka kelompok yang diluar sistem dan menganggap wilayahnya telah diperintah oleh orang asing. Disisi lain klaim kedekatan antara Patani dengan bangsa Melayu dianggap sebagian besar masyarakat Thai sebagai ketidaksetiaan kelompok Muslim Thailand selatan terhadap negara sehingga berakibat pada perilaku diskriminatif terhadap kelompok minoritas Islam ini.

Pola integrasi kebudayaan yang diterapkan pemerintah kerajaan Siam dalam proses penanganan konflik di Patani lebih banyak menggunakan pendekatan dominasi etnik mayoritas, akulturasi, dan ‘multikulturalisme semu’.

Dominasi etnik mayoritas (etnis Thai) diterjemahkan oleh pemerintah daerah dengan memaksakan kebijakan asimilasi kebudayaan terhadap etnik minoritas. Contohnya etnik minoritas diwajibkan menggunakan bahasa, adat-istiadat, dan aturan-aturan yang digunakan oleh etnik mayoritas. Dalam hal akulturasi kebudayaan dimana dapat terjadi apabila antara etnik-etnik yang berbaur tidak ada yang menjadi mayoritas serta neraca pertukaran politik antar etnis tergantung dari sejauhmana daya tawar yang dimilikinya, itu semua tidak dapat

diwujudkan di Patani. Sementara ide multikulturalisme gagal pula diterapkan. Sebabnya faktor etnik dan agama sudah tidak menjadi pertimbangan dalam hubungan antara kelompok-kelompok masyarakat. Tampaknya pemerintah Thailand masih menggunakan pola penyelesaian masalah integrasi melalui 3 pendekatan tersebut dalam upaya membangun kesatuan nasional. Penerapan azas multikulturalisme yang berusaha menerima segala perbedaan belum terlaksana karena kenyataan di lapangan pihak aparat masih terlihat senang menembaki kaum pemberontak dari pada melakukan upaya perundingan damai untuk mendapatkan kesepakatan bersama. Situasi ini dapat dilihat dari masih berlangsungnya tindak kekerasan di Thailand selatan hingga sekarang.

Kronologi Aksi kekerasan di Thailand Selatan per Januari 2004

No	Tanggal	Kejadian
1	4 Januari 2004	Gudang senjata militer di Provinsi Narathiwat, Thailand selatan, diserbu gerombolan bersenjata yang diduga terkait dengan Jemaah Islamiyah. Serangan gerombolan itu menewaskan 4 tentara pemerintah. Gerombolan itu merampas 100 pucuk senjata dan membakar 18 sekolah
2	5 Januari 2004	Pemerintah thailand memberlakukan keadaan darurat perang di 3 provinsi di Thailand selatan yang berbatasan dengan Malaysia, yaitu, Provinsi Narathiwat, Yalla dan Pattani
3	4 Februari 2004	Thavee Wuthiboon, sarjana irigasi yang menjadi pegawai pemerintah tewas dibacok 2 pemuda bersepeda motor ketika sedang jogging di sepanjang bendungan di Distrik Yarang, Provinsi Pattani, sekitar 1.050 km selatan Bangkok
4	19 Februari 2004	Kembali serangan terjadi di Thailand selatan yang mengakibatkan 3 orang tewas, sementara 3 orang lainnya cedera. Salah satu korban yang tewas adalah seorang polisi yang baru saja selesai bertugas. Sementara itu terpaksa ratusan sekolah terpaksa di libur karena mendapat ancaman
5	22 Maret 2004	Sebuah bom meledak di dekat Balaikota di Thailand selatan, tempat Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertahanan Thailand sedang mengadakan pertemuan dengan pejabat-pejabat kepolisian. Ledakan tersebut mengakibatkan satu orang cedera. Sementara itu seorang polisi tertembak pada sebuah peristiwa yang terpisah. Dengan demikian jumlah korban yang tewas akibat kekerasan yang terjadi di wilayah tersebut mencapai 54 orang
6	23 April 2004	Sebanyak 50 rumah terbakar dan seorang tentara serta seorang tetua kampung tewas dalam kerusuhan di thailand selatan
7	28 April 2004	Sekelompok anak muda melancarkan serangan terhadap pos-pos keamanan di Provinsi Yala, Pattani dan Songkhla. Korban tewas mencapai 35 orang. Hingga bulan April ini jumlah korban sebanyak 113 orang terdiri dari 108 militan dan 5 orang dari pasukan keamanan yakni 3 orang polisi dan 2 serdadu militer

Sumber: Kompas 8 Mei 2004

Proses asimilasi kebudayaan sebagai akibat dari *forced integration* yang terjadi cukup lama di Patani dalam perkembangannya mengakibatkan timbulnya sikap diskriminasi baik dalam

kegiatan politik maupun kegiatan perekonomian. Stephen Castles²⁰ mengemukakan bahwa jika negara ingin membangun perekonomiannya maka perlu mengatasi problema-problema sosial dan memusatkan pada bagaimana mekanisme pasar dapat diterapkan dalam masyarakat. Ketidakmerataan pembangunan antar daerah menjadi penyebab munculnya gerakan etnik-nasionalis yang muncul di kawasan Patani. Industrialisme semu Thailand yang masih bergantung kepada ekonomi internasional berdampak tingginya ketimpangan pendapatan antara pusat dan daerah. Pada akhirnya kemudian memunculkan rasa ketidakadilan namun ketika muncul rasa ketidakadilan tersebut, tindakan yang segera diambil adalah upaya pengendalian stabilitas politik dan keamanan serta mendorong etnik minoritas untuk melakukan adaptasi terhadap sistem sosial yang sudah ada. Perwujudan dari kepentingan ekonomi negara seringkali menimbulkan ketidakadilan dalam pembagian keuntungan ekonomi karena negara dikuasai oleh kelompok mayoritas yang berkuasa.

Kelompok minoritas dengan identitas budaya yang berbeda seperti halnya Melayu-Muslims Thailand, dihadapkan pada kenyataan bahwa diperlukan suatu strategi ulang mengenai 'identitas baru' yang dapat dikedepankan dalam kehidupan masyarakat bernegara²¹. Gerakan pemberontakan dengan kekuatan senjata sangat kecil akan sulit diterima dalam rekonsiliasi negara. Gerakan budaya maupun politik bisa jadi mampu memberikan kekuatan baru dan semacam wadah yang dapat memposisikan ulang keberadaan Muslim Patani. Terutama bagi generasi muda Patani karena secara kultural mereka memiliki nilai-nilai budaya berbeda, sistem kepercayaan, gaya komunikasi dan norma-norma hubungan antar pribadi dengan bangsa Thai yang memiliki kultur dominan. Kultur yang dominan mengacu pada siapa yang terbesar dalam jumlah, kuat dalam sisi ekonomi maupun politis.

²⁰ Stephen Castles, 1998. *The Process of Integration of Migrant Communities, Population Distribution and Migration*, United Nations, Departement of Economic and Social Affair, New York. P.. 248-250.

²¹ Nur A Fadhil Lubis. 2002. *From Armed Rebellion to Cultural Resistance. A study of The Changing Identities of Malay-Muslims in Southern Thailand*. Institute of Islamic Studies North Sumatra.

Tampaknya ketika demokratisasi monarki mulai tumbuh dan berkembang di negara Thailand, diharapkan akan mendorong peran serta masyarakat Patani dalam pembangunan. Sebab kenyataan demokrasi dan globalisasi secara langsung dapat membantu Muslim Thailand tidak hanya peluang untuk partisipasi politik lebih besar tetapi juga peran yang sesuai dengan mereka di dalam pemerintah dan masyarakat. Mekanisme demokrasi ini dapat dilakukan melalui fasilitasi lokakarya dan dialog antara pihak-pihak yang mengalami konflik dimana mereka diharapkan dapat mengidentifikasi ancaman-ancaman dan ketakutan yang dirasakan masing-masing. Selain itu juga membangun empati dan rekonsiliasi di antara mereka serta memiliki sasaran meraih kesepakatan bersama yang mengakui kebutuhan identitas pokok semua pihak.

Penutup

Sejak pemerintah kerajaan Thai memasukan daerah Patani Raya ke dalam negara pada tahun 1902, kejadian protes dan pemberontakan telah berulang-ulang terjadi. Kecenderungan separatisme mereka disebabkan faktor etnisitas dan solidaritas keagamaan. Kedua faktor tersebut juga membedakan rakyat Patani dari bagian utama penduduk Thai. Dukungan kondisi sosial politik menjadikan Islam dan etnisitas Melayu terkadang digunakan untuk memobilisasi rakyat menentang campur tangan pemerintah dalam urusan mereka. Dinamisme simbolisasi Islam dan identitas Melayu tergambar dalam periode sejarah politik negeri Patani. Perubahan struktur sosial ekonomi telah memaksa orang-orang Melayu Muslim untuk menyesuaikan taktik dan orientasinya dalam perjuangan mencapai otonomi namun ciri sentralnya masih tetap dikaitkan dengan Islam dan etnisitas Melayu.

Kemunculan gerakan separatisme yang bersifat menentang sebagian disebabkan oleh tidak sinkronnya nasionalisme *trinitas* Thailand. Kenyataan tersebut adalah buah pikiran yang keliru dalam membangun masyarakat Thailand karena faktanya menunjukkan bahwa negara

tersebut adalah negeri yang majemuk. Gagasan Siamisasi yang diterapkan dengan mudah dapat dilihat sebagai upaya penyeragaman. Identitas sosial akan terus berkembang mengikuti pola perubahan yang terjadi dalam dinamika gerak sosial kehidupan bernegara. Keamanan, identitas, pengakuan, partisipasi, dan otonomi merupakan inti pembicaraan yang perlu dibangun untuk mencapai sasaran dalam membantu pihak-pihak berkonflik dalam mengidentifikasi dan mengupayakan bersama kebutuhan mereka yang tidak terpenuhi. Hasil yang diharapkan adalah mencapai kesepakatan bersama untuk memenuhi kebutuhan dasar semua pihak.

Daftar Pustaka

Auni bin Haji Abdullah. 2001. *Islam dan Perdagangan dalam Sejarah Alam Melayu. Malaysia*. Darulfikir SDN BHO.

Castles, Stephen. 1998. *The Process of Integration of Migrant Communities, Population Distribution and Migration*. United Nations, Departement of Economic and Social Affair, New York,

Fisher dkk. 2001. *Mengelola Konflik*. British Council. Jakarta.

Haji Salleh, Siti Hawa. 1992. *Hikayat Patani*. Malaysia. Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pendidikan.

Nik Anuar Nik Mahmud. 1999. *Sejarah Perjuangan Melayu Patani*. Jabatan Sejarah Universiti Kebangsaan Malaysia-Bangi

Nur A Fadhil Lubis. 2002. *From Armed Rebellion to Cultural Resistance. A study of The Changing Identities of Malay-Muslims in Southern Thailand*. Faculty of Syari'ah Institute of Islamic Studies North Sumatra.

Puaksom, Davisakd in Pompejra, Dhivaratna. 1996. A Course Taught in Sotheast Asian History. *Ayudhya in Patani's Grasp: Historical Writings and Local History*. Chulalongkorn University, Departemen Of History Faculty of Letter.

Pitsuwan, Surin. 1989. *Islam Di Thailand*. LP3S, Jakarta.

----- 1993. *Issues Affecting Border security Between Malaysia and Thailand*. Research center Faculty of Political Science, Thammasat University.

PSDR-LIPI. 2004. *Multikulturalisme, Separatisme Dan Pembangunan Negara Bangsa Di Thailand (proposal studi)*. Tidak diterbitkan.

Searle, Peter, *Ethno-religious conflict: Rise or Decline? Recent Development in Southeast Asi.*, Contemporary Southeast Asia Singapore April 2002.

Sri Nuryanti. 2003. *In Search of Local Identity of Patani*. Research Center for Politics, Indonesian Institute of Sciences (LIPI).

Teeuw, A. dan Wyatt, D.K. 1970. *Hikayat Patani*. Bibliotheca Indonesia 5. The hague: Martinus Nijhoff.

Wyatt, David, K. 1984. *Thailand a Short History*. Thailand, Silkworm Books.

Yuniarto, P. Rudolf. 2004. *Integrasi Melayu Patani: Sejarah Perubahan Geopolitik Dan Demografi (draft laporan)*. PSDR-LIPI, tidak diterbitkan.

